

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal A., 2004 , *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 2012, *Penghantar Hukum Internasional*, Yogyakarta.
- Bosko, R. E., 1993, “Fungsi Sosial Hak Atas Tanah”, Dalam *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Dhru, K. A., 2010, *Acquisition of Land for ‘Develompent’ Projects in India ; The Road Ahead*, Research Foundation for Governance, India.
- Harsono, B., 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hatta, M., 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S., 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Purwokoesoemo, S., *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985.
- Rubaie, A., 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Salindeho, J., 2008, *Manusia, Tanah, Hak, Dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salle, A., 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yagyakarta.
- Santoso, U., 2009, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Sitorus, O., 2007, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra kebijakan tanah Indonesia.

Soekanto, S., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, M., 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Sunggono, B., 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

———, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.

B. Penulisan Hukum

Mega, Daisya, 2014, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Studi Komparasi Indonesia dan India*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Nomor 170 Tahun 2012).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2012).

D. Internet

Muhammad Natsir, “Kabupaten Kulonprogo Optimis Menangkan Kasasi”, <http://www.cendananews.com/2015/06/kulonprogooptimis-menangkan-kasasi.html?m>, www.cendananews.com, diakses pada tanggal 18 Mei 2016 Pukul 12.00 WIB.

Pito Agustin, “Tanah Bandara, Kubu Anglingkusumo Beda Pendapat”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/12/078735088/tanah-bandara-kubu-anglingkusumo-dan-paku-alam-x-beda-pendapat>, www.nasional.tempo.com, diakses pada tanggal 26 Fberuari 2016 Pukul 11.00 WIB.

Rima Sekariani, “Penggarap PAG Menanti Kejelasan Kompensasi” www.harianjogja.com/baca/2016/02/12/bandarakulonprogopenggarappag-nantikan-kejelasan-kompensasi 69037, www.harianjogja.com/, diakses pada tanggal 17 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.

Rizka Widya, “Penggarap Tanah PAG Takut Tidak Dapat Ganti Rugi”, <http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/28/bandara-baru-penggarap-tanah-pag-takut-tidak-dapat-ganti-rugi-685207>, www.harianjogja.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.